

IMPLEMENTASI DOKTRIN TRI DHARMA EKA KARMA DALAM STRATEGI MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

Oleh:

Tri Yulianto¹⁾

Syaiful Rachman²⁾

Panji Suwarno³⁾

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3)}

E-mail:

yulianto290918@gmail.com¹⁾

srachman1305@gmail.com²⁾

suwarnop@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

The Tri Dharma Eka Karma Doctrine is the basic strata of the TNI guidelines which contain values and commitment to the state, democratic values, peace and the use of force as the final step. This descriptive qualitative study aims to obtain information about the implementation of the Tri Dharma Eka Karma Doctrine in the strategy of safeguarding Indonesia's national interests. This research involves the theory of national interests from Daniel S. Pap with the approach of economic, ideological and state security variables. The results of this study indicate that the Tri Dharma Eka Karma Doctrine is able to answer challenges in safeguarding Indonesia's national interests in the economic, ideological and state security sectors. Which is described through the roles, functions and duties of the Indonesian National Armed Forces (TNI). Following up on the findings in this study, related parties can maximize the role of the TNI by working together in various sectors to safeguard national interests. The limitations contained in this paper are opportunities for other researchers to analyze other factors and variables that are more complete

Keywords: *Doctrine, National Interest, Indonesian National Armed Forces*

ABSTRAK

Doktrin Tri Dharma Eka Karma strata dasar pedoman TNI yang berisi tentang nilai-nilai dan komitmen terhadap negara, nilai demokrasi, perdamaian dan penggunaan kekuatan sebagai langkah terakhir. Studi Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Doktrin Tri Dharma Eka Karma dalam strategi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini melibatkan teori kepentingan nasional dari Daniel S. Pap dengan pendekatan variabel ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Tri Dharma Eka Karma mampu menjawab tantangan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di sektor ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Yang dijabarkan melalui peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pihak-pihak terkait dapat memaksimalkan peran TNI dengan bekerja sama di berbagai sektor bidang guna menjaga kepentingan nasional. Adapun keterbatasan yang terdapat pada tulisan ini menjadi peluang peneliti lain untuk menganalisa dengan faktor dan variabel lain yang lebih lengkap

Kata Kunci: *Doktrin, Kepentingan Nasional, TNI*

1. PENDAHULUAN

Doktrin merupakan strata dasar yang berisi tentang nilai-nilai dan komitmen

terhadap negara, nilai demokrasi, perdamaian dan penggunaan kekuatan sebagai langkah terakhir (Bahan ajar Unhan,

2023). Negara Indonesia dalam arah haluan negara mempunyai doktrin pertahanan yang bertujuan sebagai dasar negara dalam melindungi setiap jengkal wilayah Indonesia yang terdiri dari sumber daya dan kemajemukan demografi yang menjadi kekuatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia (K. P. R. Indonesia, 2015). Dengan kompleksitas kepentingan bangsa Indonesia yang harus dilindungi maka negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang memadukan seluruh kekuatan negara baik kekuatan militer maupun nirmiliter. Keterpaduan ini oleh negara Indonesia disebut sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta. Upaya pertahanan negara merupakan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 30 yang berbunyi setiap warga negara wajib dan berhak dalam upaya pertahanan negara (UUD 1945). Sebagai pengimplementasian pertahanan negara yang berdaulat, adil dan berdemokrasi maka lahirlah doktrin pertahanan negara pada tahun 2014 yang dijadikan sebagai salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai unsur komponen utama membuat doktrin Tri Dharma Eka Karma yang merupakan pengejawantahan dari doktrin pertahanan

negara.

Doktrin Tri Dharma Eka Karma disahkan oleh Panglima TNI sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma yang telah diadakan perubahan I pada tanggal 1 Juli 2019. Doktrin ini merupakan doktrin militer yang mempunyai cara pandang tersendiri untuk mendefinisikan sesuatu berklasifikasi ancaman atau non ancaman. Ancaman bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, bentuk dari ancaman tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu ancaman militer, ancaman nirmiliter dan ancaman hibrida yang merupakan gabungan antara keduanya (Rahman, 2018). Doktrin Tri Dharma Eka Karma sejatinya merupakan landasan dasar dalam mempertahankan kepentingan nasional dari segala ancaman dan gangguan guna menjaga kedaulatan negara.

Melalui uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi Doktrin Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tri Dharma Eka Karma dalam strategi melindungi kepentingan nasional Indonesia guna mewujudkan kedaulatan negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang sudah membahas mengenai doktrin pertahanan khususnya doktrin TNI Tri

Dharma Eka Karma. Yang pertama adalah karya dari Faisal Rahman yang berjudul “Implementasi Doktrin Tridarma Ekakar-ma melalui Teori Perimbangan Kekuatan” dalam tulisan tersebut menggunakan teori perimbangan kekuatan versi Barry Posen yang menggunakan variabel yaitu geo-grafi, teknologi dan koalisi. Dalam teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknolo-gi merupakan variabel yang paling meliha kea rah luar negara. Dari sisi geografi dok-trin melihat melalui ancaman dalam negeri. Dalam variabel koalisi terdapat kendala dari segi kepentingan antar negara yang berbeda. Tulisan kedua karya dari (Siddik, 2021) yang berjudul” Analisis Implementasi Kebijakan TNI dalam Menghadapi Ideologi Khilafah”. Dalam tulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward yang berpendapat implementasi kebijakan di-pengaruhi oleh Komunikasi, Sumber Daya Manusi, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Analisa implementasi kebijakan TNI su-dah mencakup dalam mengahdapi ideologi Khilafah yang tidak sesuai dengan Ideolo-gi Indonesia asalakan unsur pelaksana sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan dengan baik

Kesimpulan dari tulisan-tulisan tersebut adalah doktrin pertahanan dan doktrin TNI berorientasi dalam menghadapi ancaman-ancaman militer, nirmiliter dan hybrid. Ancaman tersebut memerlukan kehadiran

dan keterlibatan militer guna menjawab gangguan yang mungkin akan timbul yang bisa merusak kepentingan nasional Indo-nesia. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dapat diimplementasikan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan meng-gambarkan, menganalisa dan menginter-pretasikan implementasi Doktrin Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tri Dharma Eka Karma dalam menjaga kepentingan na-sional guna mewujudkan kedaulatan nega-ra. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai litera-tur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan studi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah doktrin militer di indonesia be-rawal dari transisi pemerintahan era presi-den soekarno dan pemerintahan orde baru era soeharto. Pada tanggal 25 sampai dengan 31 agustus 1966 diadakan seminar Angkatan Darat II di Sekolah Komando Angkatan Darat yang melahirkan doktrin militer Ubaya Cakti. Doktrin ini mem-perkenalkan strategi militer pertahanan rakyat semesta (Perata) yang berprinsip

mengandalkan seluruh rakyat sebagai komponen cadangan untuk membantu angkatan militer apabila terjadi peperangan. Pola pembinaan doktrin ini terbagi menjadi dua yaitu pembinaan wilayah dan pembinaan teritorial. Pada bulan oktober 1966 markas besar Hankam mengadakan seminar yang melahirkan doktrin TNI Catur Darma Eka Karma. Dalam doktrin tersebut masih menempatkan Perata sebagai strategi pertahanan negara. Salah satu agenda terpenting dari doktrin Cadek ini ialah disatukannya TNI dan Polri dalam naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dapat dilihat bahwa peran fungsi pertahanan dan keamanan dipegang oleh ABRI. Fungsi pertahanan sebagai jawaban atas ancaman yang berasal dari luar dan fungsi kemanan sebagai jawaban atas ancaman yang berasal dari dalam negeri.

Pada tahun 1988 Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani menetapkan doktrin perjuangan TNI-ABRI Catur Darma Eka Karma 1988 melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/04/II/1988 sebagai doktrin induk angkatan bersenjata. Dalam doktrin Cadek 1988 terbagi atas tiga yaitu sistem pertahanan, politik pertahanan dan strategi pertahanan. Dalam doktrin ini pertahanan kemanan negara masih mengandalkan simhankamrata sebagai dasar pertahanan. Sistem pertahanan negara dikembangkan dengan mendaya-

gunakan segenap sumber daya nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah. Dalam perkembangan dan dinamika nasional maka pada tahun 2007 ditetapkan doktrin militer yang baru bernama Tri Dharma Eka Karma untuk menggantikan doktrin Catur Dhama Eka Karma 1988 melalui Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/21/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Dengan ditetapkannya doktrin Tri Dharma Eka Karma sebagai jawaban atas perubahan era reformasi yang memisahkan unsur TNI dan Polri yang memfokuskan peran dan tugas masing-masing. Melalui perubahan ini sebagai landasan untuk TNI menata organisasi dan melaksanakan reformasi ditubuh TNI. Doktrin militer terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dalam menghadapi tantangan tugas dimasa mendatang, doktrin Tri Dharma Eka Karma direvisi terakhir melalui Keputusan Panglima TNI tanggal 1 Juli 2019 tentang perubahan atas Tri Dharma Eka Karma tahun 2018. (M. B. T. N. Indonesia, 2018)

Penelitian ini melihat bagaimana implementasi dari doktrin Tri Dharma Eka Karma dalam menjaga kepentingan nasional guna mewujudkan kedaulatan negara. Doktrin tri dharma eka karma ini adalah versi tahun 2019 sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555.a/VI/2018 tanggal 1 juli 2019 tentang perubahan atas doktrin Tri Dharma Eka Karma. Pendeka-

tan Analisa menggunakan Teori Kepentingan Nasional dari Daniel S. Pap yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek antara lain ekonomi, ideologi dan keamanan negara.

Aspek Ekonomi

Salah satu tugas TNI sebagaimana yang terdapat pada doktrin Tri Dharma Eka Karma ialah tugas operasi militer selain perang yang berarti bahwa tugas TNI tidak hanya dalam hal perang tapi juga bertugas diluar konteks perang. Dalam sektor ekonomi, TNI mempunyai andil dalam mendukung tugas pemerintah dalam mem-berdayakan ekonomi negara baik dalam konteks makro dan mikro. Peran tersebut sangat terlihat bagaimana ketika terjadi pandemi covid 19 yang melanda Indone-sia, TNI bersama komponen bangsa ber-kontribusi aktif dalam memulihkan perekonomian. Sinergisatas tersebut sangat terasa sekali dampaknya bagaimana keterpurukan perekonomian awal 2020 hingga akhirnya kembali bangkit pada ta-hun 2022. Pada tahun 2021 pemerintah melaksanakan program bantuan tunai pedagang kaki lima yang disalurkan me-lalui TNI dan aparat lain. Menteri perekonomian airlangga hartanto menga-takan bahwa penyaluran bantuan tersebut mencapai 100% dalam waktu yang sing-kat. Berkat peran TNI proram BT-PKLW merupakan salah satu program PEN yang

memiliki serapan tertinggi dalam waktu yang singkat di tahun 2021. Pemerintah menilai peran TNI sangat baik, sehingga program BT-PKLW tersebut dilanjutkan dengan memperluas dan menambah target penerima. selain PKL dan warung, sasaran diperluas ke nelayan, pada tahun 2022 program ini menysasar sekitar 212 kabupat-en dan kota yang masuk dalam roadmap program pengentasan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan mendekati 0% di tahun 2024 (Siaran Pers Kemenko Ekonomi, 2022).

Selain itu TNI juga mempunyai tugas membantu tugas pemerintah daerah. Sifat membantu pemerintah daerah ini sangat luas. Dalam perekonomian di daerah TNI senantiasa memberikan peran nyatanya, sebagai contoh dalam menyukseskan pro-gram swasembada padi, TNI turut serta memberikan pendampingan kepada ke-lompok usaha tani. Pendampingan dimulai dari program cetak sawah, penyuluhan, mengusahakan pupuk sampai dengan pen-dampingan panen sampai mengkoordi-nasikan gabah dapat terjual dan terserap dengan baik. Tidak hanya peran pada sektor mikro, dalam sektor makro TNI ju-ga mempunyai andil dalam memberikan triger untuk mendorong kemandirian in-dustri pertahanan dalam negeri. TNI mempunyai visi untuk menggunakan produk-produk dalam negeri serta mem-berikan saran masukan kepada industri

pertahanan untuk terus memperbaiki kualitas produknya. Dengan begitu industri pertahanan akan semakin maju dan tidak menutup kemungkinan kedepana akan menjadi industri pertahanan global. Majunya sektor industri pertahanan akan memberikan kontribusi devisa dan pendapatan yang besar bagi negara.

Aspek Ideologi

Kata ideologi berasal dari kata *ideo* dan *logi* Bahasa Yunani yang berarti pengetahuan tentang ide-ide. Istilah ideologi memiliki korelasi dengan bidang ilmu kehidupan manusia diantaranya politik, hukum, hankam, sosial, budaya dan agama. Pada dasarnya manusia memiliki jalan dan kehidupannya masing-masing dan dapat merubah kehidupannya dengan pola pikirnya sendiri (Suhas, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia mampu merenkontruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kemudian melahirkan ide dan doktrin oleh seseorang dan dikembangkan dalam kelompok tertentu. Bangsa indonesia telah menentukan jati dirinya untuk memilih ideologi pancasila sebagai falsah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Falsafah negara ini tidak bisa diganggu gugat oleh ideologi apapun.

TNI sebagai komponen utama bangsa menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi negara. Implementasi tersebut termuat dalam Kep/555/VI/2018 tanggal 6

Juni 2018 tentang Doktrin Tri Dharma Eka Karma Bab 3 mengenai ancaman dan gangguan yang disebutkan pada poin 1 ancaman non militer yakni ideologi. Dijelaskan bahwa ancaman yang berdimensi ideologi adalah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Baik dari eksternal/luar seperti paham liberalisme dan komunisme. Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma merupakan salah satu kebijakan dan strategi yang diperlukan TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan keutuhan wilayah Indonesia. Kebijakan ini dirumuskan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pertahanan negara yang diorientasikan agar mampu melaksanakan tugas pokok TNI dalam konteks pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Pemberdayaan ideologi ini diimplementasikan secara langsung oleh prajurit TNI secara langsung dengan memberikan pelatihan bela negara baik skala terkecil tingkat daerah oleh Babinsa dan skala besar melalui pembentukan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Kementrian Pertahanan.

Aspek Keamanan Negara

Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer serta perjalanan diplomasi baik dalam damai dan perang. Dalam doktrin TNI Tri

Dharma Eka Karma pada bab Fungsi TNI mengatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Yang kedua, sebagai penindak terhadap setiap ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (Wahyudi & Syauqillah, 2021). Yang ketiga sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Keamanan negara menjadi tanggungjawab segenap rakyat terutama TNI sebagai komponen utama. Tugas tersebut termaktub dalam doktrin tri dharma eka karma bab tugas TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Implementasi tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer perang dan operasi militer selain perang, yaitu untuk :

a. Mengatasi gerakan separatis bersen-

jata

- b. Mengatasi pemberontakan bersenjata
- c. Mengatasi aksi terorisme
- d. Mengamankan wilayah perbatasan
- e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- g. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- i. Membantu tugas pemerintah daerah
- j. Membantu polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

5. SIMPULAN

Dari penjelasan uraian diatas terlihat bahwa Doktrin Tri Dharma Eka Karma telah menjawab tantangan tugas kedepan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia. Pada aspek ekonomi terlihat jelas peran dan fungsi TNI dalam mengambil peran dalam mendukung program-program ekonomi pemerintah baik program sector mikro yang menysasar perekonomian rakyat maupun perekonomian makro yang berskala nasional. Pada aspek ideologi Doktrin Tri Dharma Eka Karma mengatur tentang bab Ideologi yang memberikan tugas TNi dalam peranya untuk menjaga ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa dari segala ancaman dan gangguan ideologi lain. Dari aspek keamanan negara sudah tidak diragukan lagi bagaimana TNI menjaga kedaulatan negara sebagaimana tertuang dalam Doktrin Tri Dharma Eka Karma tentang tugas pokok TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Adapun berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan peran serta fungsi TNI dalam menghadapi ancaman yang teraktual dalam masa mendatang. Dengan keterbatasan pada penelitian ini memungkinkan peneliti lain untuk meneliti dengan teori dan variabel yang lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, K. P. R. (2015). Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015. *Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.*
- Indonesia, M. B. T. N. (2018). Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma. *Jakarta: Mabes TNI.*
- Rahman, F. (2018). Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma Melalui Teori Perimbangan Kekuatan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik, 4(1), 78–96.*
- Siddik, T. A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan TNI Dalam Menghadapi Ideologi Khilafah. *Jurnal Middle East and Islamic Studies, 8(2), 2.*
- Suhas, H. (2017). Mewujudkan Jalan pencerahan. *Jakarta: Hilman Media.*
- Wahyudi, R., & Syauquillah, M. (2021). Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *NUSANTA-RA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(7), 1864–1879.*